BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai Analisis Efektivitas dan Kontribusi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Pariaman Sebelum dan Setelah Menjadi Pajak Daerah dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat efektivitas BPHTB sebelum dan setelah menjadi pajak daerah dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Rata-rata tingkat efektivitas BPHTB sebelum menjadi pajak daerah (2009-2010) adalah sebesar 90% dengan kategori cukup efektif. Angka rata-rata tersebut didapat dari hasil perbandingan realisasi penerimaan BPHTB dengan target/anggaran penerimaan BPHTB Kota Pariaman. Dimana pada tahun 2009 diperoleh tingkat efektivitas sebesar 115,23% dengan kategori sangat efektif, dan pada tahun 2010 diperoleh tingkat efektivitas sebesar 64,76% dengan kategori kurang efektif. Penurunan efektivitas ini disebabkan karena target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah Kota Pariaman jauh lebih tinggi bila dibandingkan dari tahun sebelumnya yaitu dari 2.293.810.000 menjadi 3.363.762.245.
 - b. Rata-rata efektivitas BPHTB setelah menjadi pajak daerah (2011-2015) adalah sebesar 230,66% dengan kategori sangat efektif. Dimana pada tahun 2011 diperoleh tingkat efektivitas sebesar 581,12% dengan

kategori sangat efektif, pada tahun 2012 sebesar 202,04% dengan kategori sangat efektif, tahun 2013 sebesar 100,27% dengan kategori sangat efektif, tahun 2014 sebesar 106,06% dengan kategori sangat efektif, dan tahun 2015 sebesar 163,84% dengan kategori sangat efektif. Walaupun efektivitas penerimaan BPHTB setelah menjadi pajak daerah berfluktuasi setiap tahunnya ,namun hal ini tetap jauh lebih baik dibandingkan dengan sebelum BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah dan mendapatkan rata-rata efektivitas sangat efektif. Artinya, pemerintah daerah Kota Pariaman telah melakukan upaya yang cukup efektif dan sangat efisien dalam mengelola keuangan daerahnya dalam rangka meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Tingkat kontribusi penerimaan BPHTB sebelum dan setelah menjadi pajak daerah dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a. Sebelum menjadi pajak daerah BPHTB merupakan pajak pusat yang dibagikan kepada daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH). DBH sendiri merupakan bagian dari Dana Perimbangan. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Adapun kontribusi BPHTB terhadap DBH pada tahun 2009 yaitu sebesar 13,76%, dan menurun pada tahun 2010 menjadi sebesar 10,26%. Sementara itu kontribusi BPHTB terhadap Dana Perimbangan pada tahun 2009 adalah sebesar 0,90%, dan pada tahun 2010 menurun sebesar 0,78%. Kontribusi BPHTB terhadap Dana Perimbangan rata-rata 0,84% dengan kategori sangat kurang.

Dikarenakan kontribusi BPHTB yang cukup kurang terhadap DBH, maka kontribusinya terhadap Dana Perimbangan juga sangat kurang. Selanjutnya kontribusi DBH terhadap Dana Perimbangan pada tahun 2009 adalah sebesar 6,57% dan meningkat pada tahun 2010 sebesar 7,65%. Kontribusi DBH terhadap Dana Perimbangan dapat dikatakan kecil karena penyumbang terbesar bagi Dana Perimbangan adalah Dana Alokasi Umum (DAU).

- b. Setelah menjadi pajak daerah, kontribusi BPHTB dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun pada tahun 2014 mengalami penurunan dan meningkat lagi pada tahun 2015. Dimana presentase tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 17,86%, sementara presentase terendah berada pada tahun 2011 sebesar 7,01%. Ini disebabkan karena tahun 2011 merupakan tahun pertama BPHTB dialihkan menjadi pajak daerah. Karena kontribusi BPHTB terhadap pajak daerah yang berfluktuasi, maka kontribusi BPHTB terhadap PAD juga mengalami fluktuasi, dimana kontribusi tertinggi berada pada tahun 2015 sebesar 3,56% dan kontribusi terendah berada pada tahun 2011 sebesar 1,02%. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata kontribusi BPHTB terhadap Dana Perimbangan yang hanya sebesar 0,84%, rata-rata kontribusi BPHTB terhadap PAD lebih besar, yaitu sebesar 2,17%.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya untuk melakukan peningkatan penerimaan BPHTB dengan melakukan sosialisasi tentang pajak BPHTB agar dapat mendorong kesadaran dan kemauan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemampuan dan dana operasional petugas pemungut pajak, dengan melakukan pelatihan-pelatihan bagi para pemungut pajak. Agar setiap jenis pajak daerah dapat dipungut dengan baik. Serta pemerintah daerah perlu mempertimbangkan penetapan target pajak, karena target pajak perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi daerah.
3. Perlu adanya pengembangan dan peningkatan porsi belanja modal (infrastruktur) daerah, terutama untuk pengembangan infrastruktur jalan. Peningkatan infrastruktur akan meningkatkan nilai tanah dan bangunan di daerah, sebab tanah dan bangunan memiliki prospek yang tinggi terhadap pembangunan daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dirasakan oleh penulis yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan hanya dari tahun 2009-2015. Dua tahun sebelum menjadi pajak daerah dan lima tahun setelah menjadi pajak daerah. Untuk mendapatkan analisis yang lebih baik , sebaiknya penelitian dilakukan dalam rentang waktu yang lebih lama.